

Pencemaran Air Sungai: Canangkan Rehabilitasi 16,6 Km Sungai Pemerintah Pusat dan DKI Lepas Tangan



Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tampak lepas tangan atas rusaknya 13 sungai yang melintas di Jakarta. Keduanya sepakat menuduh masyarakat sebagai biang pencemaran air sungai.

"Pemerintah pusat tidak bisa mencegah volume sampah yang berasal dari masyarakat. Pemerintah hanya bisa melakukan rehabilitasi sungai. Kunci bersih-tidaknya sampah itu ada di tangan masyarakat," ujar Suprpto, Kasubdit Wilayah III Ditjen Sungai dan Pantai SDA Kementerian Pekerjaan Umum, dalam acara HSBC Water Warrior: Diskusi Publik "Bagaimana Membenahi Kualitas Air Kali Pesanggrahan?" di Kedai Tempo, Selasa (21/6).

Suprpto mengatakan masyarakat Jakarta menyumbang 80 persen sampah yang ada di sungai. Sampah yang disumbangkan itu berupa deterjen, sayuran, minyak goreng, plastik, dan jenis sampah rumah tangga lain.

Data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan jumlah sampah yang memprihatinkan setiap harinya. Dari 27 ribu kubik sampah di DKI Jakarta setiap harinya, 2-3 persennya merupakan sampah yang dikeruk dari sungai. "Dua-tiga persen itu setara dengan sampah yang ada di 200 truk puso, dan itu sangat banyak. Kementerian PU tidak bisa mencegah atau mengurangi jumlah sampah tersebut. Kementerian hanya dapat mengeruk sampah yang ada di sungai," jelasnya.

Suprpto mengatakan jumlah itu tidak dapat dikurangi oleh pihak Kementerian PU. Pihaknya hanya bisa memperbaiki dari sisi infrastruktur sungai, seperti melakukan normalisasi sungai, rehabilitasi penampang sungai, pengerukan sampah muara sungai, dan pengerukan sedimen.

Salah satu program yang diusulkan ialah rehabilitasi 16,6 km sungai di Jakarta yang rencananya dilaksanakan pada 2011-2014. Namun, rehabilitasi sungai tidak akan efektif jika tidak ada kepedulian dari

masyarakat. Jumlah penduduk DKI Jakarta yang meningkat setiap tahun juga turut memengaruhi keefektifan rehabilitasi tersebut. "Butuh kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dan tinggal di bantaran kali," jelasnya.

Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan BPLHD DKI Jakarta Rusman Sagala mengatakan masyarakat Ibu Kota merupakan satu dari tiga instrumen untuk menciptakan good government, termasuk dalam pengendalian pencemaran lingkungan air sungai. "Masyarakat harus menghargai sungai layaknya makhluk hidup. Oleh karena itu, setiap warga yang tinggal di bantaran kali harus pindah ke tempat yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Rusman mengatakan tidak adanya Instrumen Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kecil di setiap rumah menjadi penyebab setiap sampah langsung masuk ke sungai. Tidak adanya IPAL, lanjutnya, membuat sampah berjenis keras, seperti deterjen, langsung masuk dan merusak mutu air. "Daya rusak sampah deterjen lebih berbahaya daripada polusi udara (CO₂) bagi lingkungan hidup. "Namun, harus diakui bahwa di Indonesia belum ada yang mampu memproduksi soft detergent," jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat saling mengawasi dan peduli pada kebersihan lingkungan air sungai. Jumlah pengawas BPLHD yang hanya sekitar 200 orang tidak akan mampu mengawasi 10 juta penduduk DKI Jakarta.

Rusman juga berharap Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan Standar Baku Mutu Air Sasaran. Pasalnya, 13 sungai yang ada di Jakarta sudah tercemar dan tidak bisa digunakan sebagai bahan baku air minum, wisata air, dan kebutuhan bagi peternakan.

Dengan adanya Standar Baku Mutu Sasaran, lanjut Rusman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membuat Rencana Aksi (Renaksi) untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU. "Jika memang air sungai di Jakarta sasarannya untuk wisata air, atau baku air minum, maka Renaksi akan dirancang dan dilaksanakan dengan target waktu yang disepakati," jelasnya.

Rusman juga mengimbau pemerintah pusat tidak merehabilitasi alur sungai dari berbelok-belok menjadi lurus. Alur sungai yang lurus menyebabkan kecepatan air menuju laut semakin tinggi. Kondisi itu sangat berbahaya bagi penduduk di Jakarta Utara yang sering kali ditimpa rob. "Jangan diluruskan sungainya, tetapkanlah seperti semula untuk menghindari feedback air dari laut ke daratan (rob),"